

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis di Indonesia saat ini sedang berkembang dan tumbuh dengan pesat. Pelaku usaha mulai bersaing mengembangkan usahanya secara inovatif dan kreatif dengan cara memanfaatkan teknologi sebagai sarana usaha sesuai dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kemudahan dalam kegiatan sehari-hari. Teknologi yang dimanfaatkan pelaku usaha salah satunya yaitu kecanggihan pemrograman aplikasi berbasis *online* melalui android¹ maupun iOS² yang pengoperasiannya sebagian menggunakan internet dan sebagian lagi bisa dioperasikan tanpa memerlukan jaringan internet. Hal ini dapat dilihat melalui semakin banyak aplikasi-aplikasi berbasis *online* seperti aplikasi penjualan barang, aplikasi tiket *online* dan lain sebagainya yang dapat diunduh melalui *google play*³ maupun *app store*⁴ pada setiap *smartphone* android maupun ios.

Akibat perkembangan teknologi informasi, bidang transportasi juga ikut mengalami perkembangan dengan adanya transportasi dengan

¹ Android adalah adalah sistem operasi berbasis Bahasa pemrograman Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. <http://www.wikipedia.org>. Diakses tanggal 5 Desember 2018

² iOS merupakan singkatan dari Iphone Operating System yang memiliki arti sistem operasi perangkat bergerak yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. <http://www.wikipedia.org>. Diakses tanggal 5 Desember 2018

³ Google Play adalah layanan konten digital milik google yang melingkupi took untuk produk-produk seperti musik/lagu, buku, aplikasi, permainan, ataupun pemutar media berbasis awan. <http://www.wikipedia.org>. Diakses tanggal 5 Desember 2018

⁴ App Store platform distribusi aplikasi untuk iOS yang dikembangkan dan dikelola Apple Inc untuk pengguna agar dapat menjelajah dan mengunduh aplikasi. <http://www.wikipedia.org>. Diakses tanggal 5 Desember 2018

memanfaatkan teknologi yakni transportasi berbasis *online*. Pengguna jasa atau pengguna aplikasi transportasi *online* sudah mulai marak dan terus meningkat di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan fasilitas tersebut memiliki keunggulan berupa kemudahan dalam penggunaannya, orang hanya perlu mengunduh aplikasi kemudian dapat menggunakan aplikasi tersebut sesuai kebutuhan. Sistemnya yang bekerja secara *online* dan menggunakan fitur *GPS*⁵ juga memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam menentukan titik penjemputan maupun lokasi tujuan dengan lebih detail dan akurat. Adapun jasa aplikasi transportasi berbasis *online* di Indonesia yaitu Go-Jek dan Grab.⁶

Keberadaan jasa transportasi online pada masa kini memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Akan tetapi, dengan keberadaan transportasi online juga menimbulkan adanya pro-kontra diantara masyarakat terutama pada penyedia jasa angkutan umum secara konvensional yang merasa rugi dengan keberadaan transportasi online. Mereka merasa bahwa keberadaan transportasi online menyebabkan turunnya minat dari para pengguna jasa transportasi umum konvensional yang berdampak pada penurunan perolehan pendapatan yang sangat signifikan. Faktor inilah yang memicu para pengemudi angkutan umum konvensional melakukan demonstrasi secara besar-besaran untuk

⁵ GPS merupakan singkatan dari Global Positioning System atau sistem pemosisi global adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit. <http://www.wikipedia.org>. Diakses tanggal 5 Desember 2018

⁶ Atika Zahra. 2017. *Skripsi Tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, Dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Ojek Online*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta

menyatakan penolakan terhadap keberadaan transportasi online dan menuntut pemerintah untuk mencabut izin yang telah diberikan untuk penyelenggaraan transportasi online.

Demi mengatasi beberapa masalah yang muncul karena adanya perbedaan pendapat atas kehadiran transportasi online, dalam hal ini Kementerian Perhubungan selaku instansi Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang memiliki tujuan untuk mengakomodasi dan mengatur segala kegiatan pengangkutan atau transportasi umum yang dilakukan secara online ataupun konvensional agar tidak terdapat permasalahan diantara transportasi online dengan transportasi konvensional yang kemudian juga menjadi kejelasan akan adanya payung hukum bagi transportasi online. Ketentuan-ketentuan dalam PM 108/2017 khususnya yang terkait dengan transportasi online diantaranya adalah: Transportasi online tergolong dalam kategori angkutan sewa khusus, terdapat pembatasan wewenang bagi perusahaan aplikasi dalam pelaksanaan angkutan online, dan ketentuan tarif batas bawah dan tarif batas atas transportasi.

Selain sangat memudahkan masyarakat dengan adanya jasa transportasi online juga memberikan kelebihan dan keuntungan kepada masyarakat. Adapun manfaat dari keberadaan jasa transportasi ojek online dirasakan masyarakat sebagai konsumen dan dapat memberi manfaat bagi

masyarakat yang membutuhkan pekerjaan yakni menjadi lapangan pekerjaan dan bagi masyarakat yang mempunyai usaha yang membutuhkan jasa pada bagian pengiriman dapat juga melakukan kerjasama kemitraan berupa pengadaan jasa kurir online sehingga proses distribusi dan pengiriman produk dagangan untuk para konsumen dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Dalam menjalankan usahanya, PT. Grab bekerja sama dengan driver. Hal ini memudahkan masyarakat agar bisa bergabung menjadi mitra kerja jasa ojek online yaitu sebagai driver ojek online, hal ini tentu saja memberi manfaat yang begitu besar dikarenakan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar meski hanya sebagai mitra. Agar dapat menjadi driver ojek online maka calon driver ini perlu melakukan perjanjian dengan perusahaan penyedia aplikasi jasa ojek online. Perjanjian tersebut berupa perjanjian elektronik, adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 17 memiliki pengertian kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Perjanjian memiliki bagian penting dalam melaksanakan bisnis terutama dalam hal kemitran. Segala kegiatan dan ketentuan-ketentuan diatur dalam hukum perjanjian agar bisnis dapat dijalankan dengan lancar, tertib dan aman sehingga tidak ada pihak yang merasa rugi karena ada kegiatan bisnis tersebut. Perjanjian kemitraan adalah salah satu perjanjian

yang tidak diatur dalam buku III BW karena muncul dari asas kebebasan berkontrak. Perkembangan dalam hal ini terjadi karna keberadaan Pasal 1320, 1338 dan 1339 BW yang mengandung asas kebebasan berkontrak. Pada buku III BW menganut sistem terbuka, oleh karena itu para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bentuk perjanjian, menentukan objek perjanjian, pada sistem hukum mana perjanjian tersebut bisa tunduk dan juga mekanisme yang dapat ditempuh apabila terjadi masalah dikemudian hari yang berhubungan dengan perjanjian yang telah dibuat.⁷

Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian kemitraan diantara driver dan perusahaan, menggunakan perjanjian kerjasama kemitraan.⁸ Perjanjian kemitraan yang digunakan didalam kerjasama antar Perusahaan penyedia aplikasi jasa transportasi online dengan *driver* harus ikut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM pada bab VIII di mana dijelaskan bahwa di dalam isi perjanjian kemitraan sekurang-kurangnya harus mengatur mengenai kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Mengenai pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008 diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, dengan inti pembahasannya adalah pelaksanaan kemitraan harus

⁷ Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.9

⁸ I Wayan Wiryawan.(et.al.) 2017. *Jurnal Hukum Tentang Analisis Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT.Gojek Dengan Driver Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Fakultas Hukum. Universitas Udayana

didasarkan pada prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan.

Aplikasi Grab menawarkan banyak pilihan layanan transportasi mulai dari taksi, mobil pribadi, sepeda motor, pemesanan makanan, layanan nebeng, hingga pengiriman paket untuk memenuhi kebutuhan penumpang.⁹ Layanan yang ditawarkan di kota Malang antara lain *GrabCar* atau layanan transportasi untuk mereka yang memilih kenyamanan berkendara layaknya menggunakan mobil pribadi, *GrabBike* atau layanan transportasi dengan menggunakan sepeda motor, *GrabExpress* atau layanan pengiriman paket yang cepat, aman dan terpercaya, *GrabFood* atau layanan pesan antar makanan, dan yang terbaru yakni *GrabFresh* atau layanan pengiriman terbaru yang mengantarkan belanjaan dari supermarket.¹⁰

Salah satu fitur aplikasi Grab adalah *GrabFood* yang merupakan layanan pesan antar makanan. Cara pemesanan makanan pada aplikasi Grabfood hanya dengan cara memilih nama toko atau *restaurant* pada aplikasi, kemudian memilih menu makanan yang diinginkan yang telah tertera pada aplikasi dan kemudian akan muncul total harga yang harus dibayarkan. Informasi yang ada kemudian dikirim ke *server* Grab dan sistem informasi Grab meneruskan informasi ke *driver* yang ada di sekitar lokasi. *Driver* menerima pesanan atau orderan, memesan makanan yang

⁹ Yudhi Satria, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Aplikasi Uber dan Grabcar Sebagai Angkutan Berbasis Aplikasi Online*, Makassar, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Hal. 55

¹⁰ Grab, 2018, *Layanan*, www.grab.com, diakses pada tanggal 5 Juli 2018 pada Pukul 03.39 WIB

dipilih dengan pembayaran terlebih dulu pada pesanaan tersebut, kemudian mengantarkan makanan ke tempat yang telah ditentukan pemesan.

Sesungguhnya dengan adanya layanan pesan antar makanan atau *GrabFood* sangatlah mempermudah para konsumen yang tidak bisa membeli makanan di *restaurant* yang tidak menyediakan layanan pengantaran makanan. Akan tetapi, pada saat melakukan pekerjaannya sebagai mitra tidak jarang pihak driver mengalami kerugian. Hal ini dikarenakan adanya order fiktif yang disebabkan konsumen yang tidak bertanggungjawab dalam menggunakan aplikasi Grab dengan menggunakan layanan *GrabFood* yang membatalkan pemesanan saat pengantaran pesanan makanan oleh *driver* ataupun memberikan alamat tujuan palsu kepada *driver*. Tentu saja hal ini menimbulkan kerugian pada *driver* karena sistem pembayaran dalam layanan tersebut dibebankan kepada *driver* terlebih dulu untuk pembayaran makanan yang dipesan baru kemudian diantar menuju alamat yang dicantumkan oleh konsumen. Kejadian seperti itulah yang membuat *driver GrabFood* mendapat kerugian. Permasalahan tersebut semakin parah karena belum ada bentuk ganti rugi dari pihak PT. Grab selaku pembuat aplikasi ke pada para *driver*, mempertimbangkan bahwa adanya kerugian yang dialami *driver* terjadi diluar daripada kesalahan yang dilakukan *driver* itu sendiri.¹¹

Order fiktif yang terjadi pada mitra driver merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3)

¹¹ Andi selaku driver grab malang, Wawancara, pada tanggal 18 Oktober 2018

menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum sehingga negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Oleh sebab itu mitra driver berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap adanya kerugian yang disebabkan oleh peristiwa order fiktif.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis berniat melakukan penelitian untuk mengetahui keberadaan bentuk tanggungjawab dan perlindungan hukum antara pihak Grab dengan *driver* terkait permasalahan tersebut. Sesuai dengan penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, dalam menulis skripsi ini, penulis bermaksud untuk membahas mengenai permasalahan di atas dengan judul skripsi:

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT ORDER FIKTIF PADA LAYANAN GRABFOOD (Studi di PT. Grab Indonesia Kota Malang)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian elektronik PT.Grab Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum dari PT. Grab Indonesia bagi driver yang mengalami kerugian akibat order fiktif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian hukum ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam perjanjian elektronik PT.Grab Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum PT. Grab Indonesia bagi driver yang mengalami kerugian akibat order fiktif.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan dari penulisan penelitian hukum ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya pada ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan perikatan/perjanjian baik secara kontrak maupun non kontraktual.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam permasalahan yang diteliti dan untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 di bidang ilmu hukum.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi patokan ataupun pertimbangan agar perusahaan dapat lebih baik dalam mengadakan peningkatan perlindungan kepada driver yang mengalami kerugian akibat order fiktif.

c. Bagi Driver

Dengan adanya hasil peneliti ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi para driver agar dapat pengetahuan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi driver yang mengalami rugi akibat order fiktif.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan maupun referensi bagi masyarakat mengenai masalah hukum dalam perlindungan hukum bagi driver yang mengalami kerugian akibat order fiktif.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara melakukan suatu hal dengan penggunaan pikiran dengan seksama demi mencapai sebuah tujuan dengan cara proses pencarian, pencatatan, perumusan, dan analisis hingga penyusunan laporan.¹² Penelitian dalam ilmu hukum adalah seluruh bentuk aktivitas yang didasarkan pada disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi fakta dan juga

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara hal. 1

hubungan dilapangan dengan hukum yang relevan untuk kehidupan hukum, dan berdasar pada pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai macam fakta dan hubungan tersebut.¹³

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah adalah proses penyelesaian masalah yang melalui tahap-tahap yang telah ditentukan hingga dapat mencapai tujuan penelitian.¹⁴ Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang memiliki arti bahwa penelitian ini melakukan kajian terhadap kenyataan yang terjadi pada masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan tujuan agar dapat ditemukan fakta-fakta untuk kemudian diidentifikasi terhadap permasalahan yang ada sehingga pada akhirnya menemukan suatu penyelesaian masalah.¹⁵ Penulis dalam penulisan hukum akan mengkaji mengenai penyelesaian dan perlindungan hukum bagi driver ojek *online* yang mengalami kerugian pada saat melaksanakan prestasinya sebagai mitra kerja PT. Grab Indonesia.

2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT. Grab Indonesia Kota Malang karena terdapat ketertarikan peneliti dan karena PT. Grab Indonesia Kota

¹³ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum (cetakan keempat)*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 18

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 112

¹⁵ Soejono Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. hal 10

Malang ramai dipergunakan di kalangan masyarakat Kota Malang, serta mempunyai informasi terkait kasus order fiktif pada driver sehingga peneliti ingin mengetahui perlindungan hukum bagi driver yang mengalami kerugian karena order fiktif, letaknya juga strategis di Kota Malang. Serta penulis lebih muda memperoleh informasi dari pihak PT. Grab Indonesia Kota Malang.

3. Jenis Data

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat. Adapun pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.¹⁶ Sumber data primer didapatkan langsung dari lokasi penelitian terkait yaitu PT. Grab Indonesia Kota Malang.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berwujud laporan.¹⁷

c) Data Tersier

¹⁶ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hal, 10

¹⁷ Ibid

Jenis data terkait penjelasan secara baku bahan-bahan hukum yang dapat menjelaskan mulai dari bahan hukum primer sampai sekunder yang didapat dari Kamus, Ensiklopedia, Glossary dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara:

a. Wawancara

Melalui wawancara penulis mendapat dan mengumpulkan data melalui kegiatan tanya-jawab dengan pihak yang terkait dan dianggap mengetahui informasi yang cukup mengenai perlindungan hukum bagi driver yang mengalami kerugian akibat order fiktif pada PT. Grab Indonesia Kota Malang.

Dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa orang yang memiliki keterkaitan dalam memberikan informasi mengenai penelitian tersebut, yaitu kepada:

1. City Manager PT. Grab Indonesia Kota Malang
2. Driver Grab

Responden pertama dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling secara bahasa memiliki arti disengaja. Maka purposive sampling berarti teknik pengambilan sampel secara disengaja. Peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil sehingga tidak dipilih secara acak, tapi ditentukan sendiri secara sengaja oleh peneliti. Sampel diambil berdasarkan

“penilaian” peneliti tentang siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan dan juga kriteria untuk dijadikan sampel latar belakang pengetahuan tertentu tentang sampel dibutuhkan agar bisa mendapatkan sampel yang benar-benar sesuai dengan tujuan peneliti, sehingga mendapatkan atau diperoleh data yang akurat.¹⁸ Sedangkan untuk responden nomor 2 dipilih secara acak sebanyak 10 orang driver grab di kota Malang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data ataupun dokumen-dokumen resmi sebagai bahan pendukung terkait dengan permasalahan yang diangkat yang didapatkan dari lokasi penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan sebagai acuan untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diangkat melalui buku-buku, perundang-undangan, jurnal-jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, dan literatur pendukung lainnya.

d. Internet

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan proses pencarian data ataupun informasi terkait dengan permasalahan yang diangkat melalui media internet berupa berita, artikel, dan sumber pendukung lainnya.

¹⁸ Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, ALFABETA, hal. 7

5. Teknik Analisa Data

Data yang telah diperoleh melalui penelitian dan pengumpulan data dari lokasi penelitian, kemudian dianalisa menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis dengan tujuan untuk mengamati obyek secara langsung sesuai dengan fakta dan kondisi yang terjadi di lapangan secara detail.¹⁹ Metode kualitatif memiliki tahapan yaitu pada tahap melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data secara mendalam, dimulai dari observasi sampai dengan pembuatan laporan.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum dibagi dalam empat bab dan setiap bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar mempermudah pemahaman. Adapun sistematik penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁹ Ensiklopedia Bebas, 2018, *Penelitian Kualitatif*, <http://www.wikipedia.org>, Diakses tanggal 4 Juli 2018

²⁰ Sukmadinata, Nana Syaodih, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, PT. Remaja rosdakarya, hal, 61-66.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II berisi deskripsi atau uraian yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil meliputi: tinjauan umum tentang teori hukum perjanjian, perjanjian kemitraan, hubungan hukum, perlindungan hukum, dan transaksi elektronik.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III berisi tentang pemaparan hasil penelitian terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu hubungan hukum para pihak didalam perjanjian elektronik PT.Grab Indonesia dan perlindungan hukum dari PT. Grab Indonesia bagi driver yang mengalami kerugian akibat order fiktif untuk kemudian dianalisa kesesuaian maupun keselarasan yang didasari pada fakta yang terjadi dan juga didukung kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV ini terdapat kesimpulan seluruh pembahasan yang menjadi permasalahan dari bab-bab dan sub bab yang telah dibahas dalam penelitian serta memberikan pendapat dari masalah yang dijadikan penelitian oleh penulis.